

Migran Sektor Informal dan Reproduksi Ruang Sosial Kota Menengah di Perbatasan Indonesia

Aenal Fuad Adam ^{1*}; Mohamad Ilham ²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia ; adam@unmus.ac.id

²Program Studi Akuntansi, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia ; m_ilham@unmus.ac.id

*Correspondence : adam@unmus.ac.id

ABSTRAK

Fenomena sektor informal diibaratkan sebagai lingkaran setan yang menjerat daerah perkotaan. Ada stigma negatif yang memosisikan kelompok sektor informal sebagai kaum pinggiran kota yang acapkali menjadi objek kekuasaan pemerintah daerah. Penyebabnya adalah sektor informal dipandang sebagai kelompok ekonomi informal yang kurang memiliki prospek dan tidak dapat berkembang dalam pranata ekonomi. Selain itu, sektor informal bekerja hanya mempertahankan subsistensi dan lemah pada akses informasi serta sulit menjangkau teknologi. Hal ini acapkali kegiatan sektor informal terhadang oleh represif pemerintah karena dapat mengganggu kebijakan serta menghambat modernisasi dan pertumbuhan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana perjuangan migran di sektor informal dalam ruang – ruang ekonomi baik publik maupun privat seperti di arena sosial ekonomi. Secara metodologis, makalah menggunakan penelitian kualitatif untuk menganalisis data yang tertulis dengan para informan di kota Merauke. Temuan menguraikan bahwa para migran di sektor informal bertarung di arena ekonomi melalui modal sosial dan modal budaya sebagai basis ekonomi dalam merebut ruang ekonomi di kota Merauke. Dengan demikian, modal sosial dan modal ekonomi di reproduksi sebagai modalitas yang dipertaruhkan di arena ekonomi untuk mencapai eksistensi di sektor Informal.

ABSTRACT

The phenomenon of the informal sector is likened to a vicious circle that hit urban areas. There is a negative stigma that positions informal sector groups as suburban people who are often the object of regional government power. The reason is that the informal sector is seen as an informal economic group that lacks prospects and cannot develop within economic institutions. In addition, the informal sector works only to maintain subsistence and is weak in access to information and has difficulty reaching technology. This is often the activity of the informal sector is blocked by repressive government because it can interfere with policies and hamper the modernization and growth of regional development. The purpose of this study is to explain how migrants struggle in the informal sector in economic spaces, both public and private, such as in the socio-economic arena. Methodologically, this paper uses qualitative research to analyze data written with informants in the city of Merauke. The findings describe that migrants in the informal sector fight in the economic arena through social capital and cultural capital as an economic basis in seizing economic space in the city of Merauke. Thus, social capital and economic capital are reproduced as modalities at stake in the economic arena to achieve existence in the informal sector.

Kata kunci

Modal sosial, Modal Ekonomi, Migran, Informal Ekonomi

Keywords

Social Capital; Economic Capital; Migrant; Informal Economy

Pendahuluan

Dalam mendiskusikan kelas menengah tidak bisa dilepaskan dari konsep stratifikasi sosial sebagai analisis kelas sosial. Acapkali kelas menengah secara eksplisit maupun implisit memiliki peranan sebagai agen perubahan sosial dan bahkan dipandang sebagai pembawa modernisasi dan pembangunan ekonomi (Banerjee & Duflo, 2008; Easterly 2001; Rosana Ellya 2015). Ada yang memandang hadirnya kelas menengah bertunas bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya demokrasi yang menjamin stabilitas sosial dan politik dengan memajukan kohesi sosial serta memoderasi pertarungan antara kaya dan miskin (Barro, 1996; Jati 2017; Darmaji 2018). Banyak dari penstudi Indonesia berspekulasi kelas menengah merupakan aktor protagonist bergulirnya perubahan tatanan sosial di Indonesia (van Klinken & Berenschot, 2016; Jati 2016; Jati 2017a; Suyanto et al., 2019).

Dalam struktur masyarakat, stratifikasi sosial terbentuk secara individu maupun kelompok yang kemudian membagi posisi masyarakat secara vertikal dan horizontal dari lapisan paling bawah sampai lapisan ke atas. Stratifikasi sosial menjadi sistem yang membedakan individu di dalam masyarakat dan pada gilirannya menentukan diferensiasi kelas – kelas sosial secara hak dan kewajiban maupun hierarki (Muin, 2004). Pengklasifikasian kelas – kelas sosial membentuk suatu lapisan sosial berdasarkan dimensi kekuasaan, *previlige* dan *perstise*. Selanjutnya akan membentuk segmentasi kelas – kelas sosial pada masyarakat sehingga terbentuk posisi *strata* dari status sosial (Pitirin A. Sorokin, 1998). Pengelompokan kelas sosial pada gilirannya dibentuk oleh status kekayaan dan penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan (Horton & Chester L. Hunt, 1992).

Kelas sosial dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki orientasi politik, nilai, sikap, budaya dan perilaku yang semuanya sama. Dalam perspektif determinan ekonomi menjadi parameter divergensi antara kelas – kelas sosial (Narwoko & Suyatno, 2013). Marx juga menjelaskan demikian, factor ekonomi menjadi antagonisme divergensi antar kelas sosial. Kepemilikan alat produksi adalah dasar utama pembentukan kelas sosial (Ritzer & Coleman, 2005). Sementara Bourdiue menjelaskan bahwa posisi sosial dari relasi sosial bahwa modal kapital, budaya dan simbolik menjadi penentu dari sebuah kelas sosial (Bourdieu, 1984). Misalnya kelas menengah lebih cenderung memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi ketimbang kelas menengah bawah dalam mendorong demokrasi. Dengan demikian, melihat apa yang dijelaskan bahwa kelas sosial merupakan posisi *strata* dari status sosial suatu kelompok masyarakat atau individu yang memiliki orientasi kolektif. Selain itu, kelas sosial dapat dibedakan dengan melihat status ekonomi dan kepemilikan alat – alat produksi.

Konsep kelas menengah bukan sebuah bahasan teoritik yang baru di Indonesia (Tanter & Young, 2018). Dinamika kelas menengah memiliki peran besar terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Sudah banyak ilmuwan sosial politik yang mengkaji kelas menengah di Indonesia dengan pelbagai

pendekatan – pendekatan dalam menganalisis dinamika politik kelas menengah di Indonesia (Jati, 2016b). Kelas menengah dipandang tumpuan ekonomi yang memiliki posisi sentral terhadap pertumbuhan perekonomian yang menjamin stabilitas dan kohesi sosial dan politik, bahkan kelas menengah diyakini berkontribusi mendorong pembangunan ekonomi (R. Barro, 1996) (Easterly, 2001). Meskipun begitu, secara determinan, pendefinisian kelas menengah selalu diukur berdasarkan pendapatan dan konsumsi belanja perkapita (Birdsall et al., 2000) . Kelas menengah memiliki indikator – indikator seperti tingkat pendidikan, gaya hidup, profesi sebagai rangkaian konseptual. Dalam perkembangannya, kelas menengah merupakan kelompok sosial mereka yang dianggap berpendidikan formal, berketrampilan, professional dan penjual jasa. Sementara kelompok yang tidak memiliki keterampilan, minim sumberdaya dianggap sebagai kelas bawah.

Sebuah catatan menunjukkan yang dilansir oleh Bank Dunia telah memprediksi meningkatnya jumlah kelas menengah seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang membawa dampak pertumbuhan ekonomi (kontan.co.id, 2020). Berdasarkan laporan Bank Dunia yang berjudul *“Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia”* mencatat bahwa masih ada sekitar 115 juta orang Indonesia yang tertahan untuk pindah dari kelompok miskin yang tak berdaya menuju kelas menengah, Bank Dunia menyebut mereka sebagai calon kelas menengah (Wihardja & Cunningham, 2021). Namun yang menarik, pandemi covid 19 yang memberi dampak terhadap kerentanan ekonomi dengan presentasi tingginya kemiskinan akibat terbatasnya akses di sektor formal. Ini berimplikasi semakin terderusnya eksistensi kelas menengah dalam arena perekonomian di kota menengah yang membawa pada kemiskinan. Kendati demikian, banyak dari kelas menengah bertransformasi menuju sektor informal mendapatkan akses di ruang – ruang ekonomi informal. Meskipun ada stigma negatif yang memosisikan kelompok ekonomi informal sebagai kaum pinggiran kota yang acapkali dipandang sebagai kelompok ekonomi yang kurang memiliki prospek dan tidak dapat berkembang dalam pranata ekonomi (Rachbini, 1991). Sektor ekonomi informal hanya bekerja untuk mempertahankan subsistensi dan lemah pada akses informasi serta sulit menjangkau teknologi. Hal ini acapkali kegiatan ekonomi informal terhadang resistensi kebijakan pemerintah karena dapat mengganggu serta menghambat industrialisasi dan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah.

Secara konseptual, kerangka kerja sektor ekonomi informal sebagai fenomena pasar kerja yang muncul di daerah perkotaan akibat migrasi perdesaan – perkotaan (Garrity & Martin, 2018). Kendati begitu deterministik, yang menempatkan hipotesis sektor informal dari pemikiran yang sangat ekonomistik dengan melihat pentingnya pengukuran upah dan status pekerjaan. Sementara Organisasi Buruh Internasional (ILO) menempatkan konsep ekonomi informal sebagai sebuah konsep yang bermakna hybrid yang berfokus pada status pekerjaan dan usaha (Nazara, 2010). Ada paradoks yang menempatkan sektor ekonomi informal sebagai kaum pinggiran yang

termaginalisasi oleh negara. Di beberapa kota di Indonesia, pekerja sektor informal mengalami resistensi terhadap kebijakan pemerintah daerah dengan mendapatkan kekerasan represif seperti penggusuran dan relokasi. Berdasarkan Data BPS Indonesia (Badan Pusat Statistik) menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua dengan ketimpangan kemiskinan pedesaan sebesar 20% dan perkotaan 5% (BPS, 2020). Boleh jadi, para kelas menengah di sektor informal menempati jumlah dari persentase ketimpangan kemiskinan yang berada di kota kecil Merauke. Di pihak lain, sektor informal memiliki potensi penyerap lapangan kerja dengan mengembangkan produktivitas barang dan jasa di luar kontrol negara. Akibat dari itu, terkadang tidak terakomodir sehingga posisi sektor informal bersifat dilematis dan ambivalen di ruang ekonomi dan politik Kota Menengah.

Dalam telaah literatur, Ningrum & Putri, Adhi Intan Perdana Ekaputri, (2014) yang menempatkan analisisnya terhadap perilaku kelas menengah yang dilihat dari pengeluaran dan gaya hidup. Dalam konstruksinya menggunakan pendekatan ekonomistik yang menitikberatkan pada pendapatan dan pengeluaran dalam menganalisa kelas menengah. Hal yang sama dengan penelitian Nizar (2015) menggunakan pendekatan konsumsi dan komoditas untuk menganalisa perilaku kelas menengah. Penelitian Jati (2016b; 2017b), menganalisis kelas menengah dalam perspektif Gerakan sosial sebagai Gerakan transformasi sosial munculnya kelas menengah di Indonesia. Sementara penelitian ini, meminjam teori dan konsep Bourdieu tentang modal dan arena untuk menjelaskan fenomena sektor informal ekonomi sebagai kelas menengah di kota menengah wilayah perbatasan Indonesia. Bourdieu dengan konsepnya akan lebih mendalam menjelaskan masalah hubungan kelas yang mengandung dimensi ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana memahami pemanfaatan ruang publik dan perjuangan kelas di ruang – ruang publik maupun privat seperti di arena sosial ekonomi. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dasar tentang kelompok informal ekonomi sebagai bentuk dari kelas menengah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi para akademisi dalam menganalisis suatu permasalahan tertentu dengan tema kelas menengah dalam ruang spasial atau arena ekonomi politik.

Metode

Dalam penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk menggali, memahami dan menelusuri fenomena informal ekonomi secara alamiah. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kota Merauke. Pada penelitian ini, peneliti menjadi instrument kunci dalam pengumpulan dan menafsirkan data. Data yang digunakan adalah pengamatan langsung, interview dan studi dokumen. Kesahihan dan kehandalan data dilakukan menggunakan model triangulasi dengan metode induktif. Subjek penelitian ini adalah aktor atau kelompok ekonomi informal di kota Merauke. Informan atau

partisipasi yang dijadikan sumber penelitian adalah kelompok - kelompok informal ekonomi di Kota Merauke. Secara rinci subjek penelitian adalah unit usaha seperti pemilik bengkel, pengusaha lokal, pedagang kaki lima, dan pedagang eceran yang dijumpai di Kota Merauke. Adapun informan atau responden lainnya sebagai penambahan unit analisis penelitian ini adalah (1) Kepala sub bagian Perekonomian Pemda Merauke; (2) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke; (3) Kepala UPTD LLK Kabupaten Merauke.

Sedangkan, analisis kelas digunakan untuk memahami diversitas yang terjadi di kalangan kelas menengah dengan mempertimbangkan kedua hal itu (keragaman dan pertentangan), akan diperoleh pemahaman yang lebih empiris dan historis mengenai pergumulan kelas menengah dalam persaingan dan pertentangannya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui proses yang terorganisir dan berkesinambungan baik di lapangan maupun di luar lapangan yang terdiri pertama. Reduksi data dengan membuat abstraksi seluruh data dari hasil catatan lapangan, observasi, wawancara dan penelusuran dokumen. Teknik ini membantu peneliti untuk mengarahkan, membuang, menggolongkan dan menajamkan data agar terbentuk secara sistematis. Kedua, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan penarikan kesimpulan. Penyajian data menjadi penting agar data mudah dipahami dan dibawa yang kemudian akan disajikan dalam bentuk naratif. Dan ketiga penyajian data yaitu kesimpulan yang bersifat umum dan sementara untuk memperoleh kesimpulan grounded dan tentative terhadap proses analisis data.

Hasil dan Pembahasan

1. Kota Merauke dan Kelas- Kelas Sosial

Kota Merauke sebagai kota yang berada di ujung timur Indonesia sedang mengalami pertumbuhan penduduk yang semakin berkembang pesat. Sebagai kota di wilayah paling timur Indonesia tidak hanya dikuasai oleh penduduk asli Papua. Pada kenyataannya, banyak juga pada pendatang yang berasal dari daerah – daerah lain yang hidup berdampingan dengan ciri khasnya masing-masing. Terutama untuk sub-sisten dan industri makanan. Para imigran ini kemudian memiliki anak yang lahir dan besar di Merauke, Papua. Bisa dikatakan gelombang migrasi memberi dampak terhadap perkembangan kota ini. Hal ini disebabkan dua factor yang menjadi daya tarik migrasi yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dikarenakan keamanan yang stabil, keragaman peluang kerja maupun usaha, dan dinamika ekonomi politik yang terlihat stabil (Sarmita & Simamora, 2019).

Kota ini bisa digambarkan sebagai pusat perkembangan pendidikan, ekonomi dan budaya. Berbagai sarana dan prasarana modern telah berkembang di daerah ini. Laju pembangunan kantor, perumahan, toko, rumah makan, industri kuliner dan fasilitas industri lainnya. Tentu saja, pertimbangan sosial, humaniora dan keagamaan berperan besar dalam konstruksi sosial perencanaan pembangunan yang terbagi

dalam tiga wilayah pusat, transisi dan pinggiran. Sebagai kawasan perkotaan di wilayah perbatasan yang dinamis, Merauke kerap dibayangi oleh ledakan demografi akibat transmigrasi. Terutama di kawasan perkotaan, keriuhan aktivitas ekonomi terlihat di sepanjang jalan raya akibat meningkatnya komunitas sosial yang memenuhi kawasan perkotaan ini. Hampir setiap tahun ruang publik dan lahan kosong terus mengalami pengurangan, yang pemanfaatannya ternyata hanya untuk kepentingan ekonomi dan komersial kelompok perkotaan non-pribumi yang mendominasi sektor ekonomi informal. Sedangkan kelompok masyarakat adat perkotaan hanya bisa menempati tempat yang tidak strategis. Kondisi demikian menunjukkan ketegangan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, terutama antara kelompok sosial urban pribumi dan kelompok urban nonpribumi dalam konstruksi sosial yang semakin kapitalis.

Berdasarkan Data BPS Indonesia (Badan Pusat Statistik) menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Papua dengan ketimpangan kemiskinan pedesaan sebesar 20% dan perkotaan 5% (BPS Indonesia, 2020). Boleh jadi, para kaum pinggiran di sektor informal menempati jumlah dari prosentasi ketimpangan kemiskinan yang berada di kota kecil Merauke. Di pihak lain, sektor informal memiliki potensi penyerap lapangan kerja dengan mengembangkan produktivitas barang dan jasa diluar kontrol negara. Akibat dari itu, terkadang tidak terakomodir sehingga posisi sektor informal bersifat dilematis dan ambivalen di ruang ekonomi dan politik di perkotaan.

Pada sektor properti bisnis perhotelan seluruhnya tersedia di kota kecil ini. Kota kecil inipun menjadi tempat *event – event* dan pentas nasional maupun internasional. Sementara sektor pertanian dan perkebunan menjadi pionir roda pembangunan perekonomian Merauke. Industri perkebunan seperti kelapa sawit, menjadi sektor yang begitu mumpuni, selain itu sektor perikanan juga menjadi andalan kota di ujung timur Indonesia. Capaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merauke, pada tahun 2022 mengalami peningkatan pesat. Angkanya sebesar 126,614,594,974 atau mencapai 75%. Pencapaian ini menjadi petanda bahwa kota Merauke mampu bertahan ditengah wabah covid 19 dengan geliat di pelbagai sektor jasa seperti restoran, hotel, toko, kios dan pedagang kaki lima yang mengalami peningkatan (Suara Merauke, 2022).

Pertumbuhan kota Merauke yang terus menjadi modern tersebut secara artifisial benar mengekspresikan simbol kemegahan, kemewahan, kemakmuran serta kesejahteraan. Namun, apakah memang demikian adanya? Bagi kelas menengah (upper middle class) yang berpenghasilan atas serta mempunyai life gaya konsumtif, boleh jadi demikian. Namun dengan tersedianya properti masa kini mereka dapat menikmati hidup dengan bangga. Sementara itu, bagi sebagian besar masyarakat rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang rendah, hal ini menunjukkan kota ini konstruksi sosial yang sangat kapitalistik. Formasi sosio-ekonomi dan politik tidak berpihak kepada mereka yang tidak memiliki modal ekonomi. Namun kepada kelas

sosial yang memiliki kekuatan modal ekonomi yang kuat. Harus dipahami bahwa banyak dari kelas - kelas sosial telah dirasuki budaya konsumerisme.

Tabel 1. Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Merauke
2017 – 2021

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020	2021
Makanan, minuman dan rokok	44,64	45,85	45,21	47,32	47,44
Pakaian dan Alas Kaki	3,15	3,20	3,21	3,10	3,13
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,45	12,33	12,30	12,20	11,50
Kesehatan & Pendidikan	5,89	5,65	5,66	6,32	7,89
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,85	18,60	18,55	16,43	15,19
Hotel dan Restoran	8,89	8,98	9,21	8,60	9,00
Lainnya.	6,09	6,00	5,93	5,84	5,34

Sumber: PDRB Kabupaten Merauke 2021

Konfigurasi sosial yang semakin kapitalistik pada akhirnya memproduksi diferensiasi kelas sosial yang diukur berdasarkan modal kapital. Sektor – sektor strategis dibidang bisnis properti, waralaba, retail dan jasa konstruksi telah dikuasai oleh mereka kelompok sosial yang bermodal besar. Kelompok sosial ekonomi mapan pun dikuasai oleh kelompok birokrat, politik dan kelas borjuis. Sementara itu, pekerja sektor informal begitu dominan menutupi sebagian wilayah perkotaan yang menjadi denyut nadi perekonomian kaum pinggiran perkotaan. Pemantiknya adalah gelombang migrasi begitu besar sementara kondisi ekonomi belum maju di sisi lain laju jumlah penduduk begitu cepat bertumbuh. Hal ini kemudian memunculkan banyaknya aktivitas ekonomi informal sebagai alternatif komoditas dan sumberdaya ekonomi bagi lapisan bawah atau kaum pinggiran agar tetap eksistensi dalam pranata sosial, ekonomi maupun politik (Triwidodo & Hidayat, 1991). Di sisi lain, para migrasi banyak dari mereka bekerja menempati kantong – kantong aktivitas ekonomi informal di Merauke. Misalnya saja, kelompok informal di bidang transportasi khususnya jasa angkutan kota (taksi),. Ada juga yang menempati di bidang perdagangan seperti pedagang kaki lima, pedagang kelontongan dan sewa jasa hiburan anak – anak yang menutupi bahu jalan – jalan di Kota Merauke. Sementara itu, di pedesaan pada bidang pertanian masih banyak yang berprofesi sebagai buruh tani.

2. Modal Sosial Migran dalam Bisnis Sektor Informal di Perkotaan

Gambaran sosial migran dapat dilihat dalam kelompok sektor ekonomi informal yang pada gilirannya menjadi tindakan sosial yang mengekspresikan aktivitas di ruang ekonomi perkotaan. Bersandar pada Bourdieu, arena bisa didefinisikan sebagai ruang konfigurasi interaksi antar aktor – aktor yang berada dalam posisi – posisi struktur sosial (Syahril, 2014). Pada akhirnya arena menjadi

ruang pertarungan dan perjuangan sumberdaya dan modalitas antar kelas – kelas sosial. Pada gilirannya arena atau ranah menjadi ruang para aktor – aktor untuk mendisposisikan maupun meredisposisi di ruang struktur sosial. Sementara itu Bourdiue membedakan tiga modalitas yaitu modal ekonomi, budaya dan sosial (Banda, 2016). Makna dari modalitas sangat luas yang mencakup hal – hal material yang memiliki nilai simbolik, bernilai budaya dan pola – pola konsumsi. Menguaknya kelompok sektor informal ekonomi memberikan juga perubahan-perubahan penting dalam memaknai ruang ekonomi perkotaan. Sama halnya di kantong – kantong ruang ekonomi perkotaan, kelompok sektor informal berjuang untuk mempertaruhkan seluruh kekuatan modalitas baik modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik untuk mempertahankan eksistensi mereka.

Keberadaan migran di sektor informal di perkotaan Merauke tidak hanya mampu mengatasi permasalahan ekonomi. Namun, ia juga dijadikan basis kekuatan sosial. Dalam membangun modal sosial, para aktor di sektor informal dibangun atas hubungan antar pedagang yang miliki kesamaan bisnis. Dari hasil wawancara dengan salah satu pemilik usaha bahwa kerjasama antar pedagang dilakukan melalui membentuk komunitas sebagai wadah untuk saling memberikan support dan wadah silaturahmi. Komunitas ini bisa dikatakan sebagai jejaring sosial yang memudahkan kelompok migran di sektor informal saling bertukar informasi dan rekrutmen pekerja karyawan bagi keberlangsungan bisnis di sektor informal. Selain itu juga dengan modal sosial tersebut para gilirannya akan memperkuat posisi – posisi mereka dalam ranah bisnis di pinggiran kota dengan demikian akan meningkatkan produktivitas usaha mereka. Agar untuk tetap memiliki eksistensi tentu saja norma – normal sosial menjadi penting dalam proses keberlangsungan mereka di sektor informal. Membayar sewa kepada pemilik toko, menjamin kebersihan di pinggiran – pinggiran toko menjadi penting sebagai cara agar dapat membangun hubungan dengan para pemilik toko – toko di pinggiran jalan.

3. Modal Budaya Migran di Sektor Informal

Perekonomian kelompok migran di sektor informal merupakan kumpulan usaha kecil yang membentuk sektor ekonomi dimana kelompok usaha memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan peluang pendapatan (Hidayat, 1978). Dibandingkan dengan sektor formal, ekonomi sektor informal cenderung lebih mudah dimasuki dan dimulai. Namun, keberlangsungan sektor ini sangat bergantung pada perkembangan bisnis dan konsumen. Secara konseptual, bisnis sektor informal merupakan kegiatan ekonomi individu yang teroganisir dan skala kecil. Sektor informal menjadi usaha dengan kegiatan ekonomi yang bebas dari intervensi negara, yang menjadi unit usaha bayangan sebagai reaksi modernisasi dan industrialisasi (Portes & Haller, 2005). Secara konseptual, modal budaya dipandang sebagai bakat alamiah berupa pengetahuan dan keterampilan yang dapat dikonversi menjadi sebuah keuntungan dalam mencapai status sosial dalam masyarakat (Syahril, 2014). Modal budaya ini

dapat dimaknai sebagai sebuah yang given yang terasosiasi melalui tradisi yang kemudian dapat ditransmisi sebagai sebuah keuntungan ekonomi yang secara simbolis bisa dipertukarkan sebagai ekonomi.

Dalam memanfaatkan modal budaya, kelompok migran – migran di sektor informal dengan modal ini mampu melakukan penetrasi di ranah bisnis dan usaha – usaha kecil menengah di kota Merauke. Misalnya migran berasal dari Jawa, berkat keterampilan dan pengetahuannya dalam membuat masakan tradisional, banyak dari mereka berbisnis kuliner seperti pedagang bakso, mie ayam dan warung makan yang menempati kantong – kantong ruang publik di kota Merauke. Hal yang sama dilakukan para migran asal NTT yang bergerak dibidang jasa transportasi, seperti taxi. Sementara migran asal Sulawesi Selatan menempati emperan – emperan jalan yang membuka bisnis jasa bengkel motor dan warung – warung kelontongan.

Modal budaya adalah akumulasi pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang dapat digunakan untuk menunjukkan kompetensi budaya seseorang dan dengan demikian status atau posisi sosialnya dalam masyarakat. Dalam tulisan awal mereka tentang subjek tersebut, Bourdieu dan Passeron (Bourdieu & Passeron, 1990) berpendapat bahwa akumulasi ini digunakan untuk memperkuat perbedaan kelas, karena kelompok orang yang secara historis dan masih sangat berbeda memiliki akses ke sumber dan bentuk pengetahuan yang berbeda, tergantung pada variabel lain seperti ras, kelas, jenis kelamin, seksualitas, suku, kebangsaan, agama bahkan usia. Dapat dikatakan bahwa modal budaya terbentuk melalui lingkungan sosial yang multidimensi dan pendidikan yang diterima individu tersebut, baik melalui pendidikan formal maupun melalui pewarisan keluarga. Dan individu hanya dapat memahami kapital dan budaya secara tidak sadar, karena begitulah cara kerjanya secara efektif. Modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain: a) Pengetahuan objektif tentang seni budaya. b) Preferensi budaya. c) Kualifikasi formal (misalnya gelar universitas). d) Keahlian budaya dan pengetahuan praktis. e) Kemampuan untuk membedakan dan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Memiliki modal budaya memungkinkan kita memperoleh kesempatan dalam hidup karena modal budaya menciptakan kesetaraan dan ketidaksetaraan selalu dimotivasi oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kelas sosial tertentu. Inti dari pandangan Bourdieu adalah bahwa modal budaya memiliki struktur nilainya sendiri, yang independen dari modal ekonomi dan memainkan peran penting dalam reproduksi ketimpangan antar kelas sosial, tidak hanya modal ekonomi tetapi juga modal budaya. Mengenai modal budaya, penting bahwa menurut Bourdieu, modal budaya adalah modal yang diperoleh seseorang dengan cara yang telah terbentuk dan terinternalisasi dalam dirinya sejak dini, misalnya melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh dari keluarga dan lingkungan.

Dalam hal ini, ia mencatat bahwa selera seseorang dapat dianggap sebagai aset budaya (Bourdieu, 1993). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan multidimensi modal budaya yang terdapat pada kelompok migrasi merupakan tradisi yang

dibentuk melalui internalisasi lingkungan dan budaya. Kepemilikan modal sosial dan modal budaya tidak kalah pentingnya bagi imigran di sektor informal ekonomi dari sekedar modal ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya pedagang membutuhkan modal sosial dan budaya untuk mendukung perannya sebagai pedagang di lapangan dimana penelitian ini menghadirkan pasar sebagai arena persaingan bagi para pedagang. Pierre Bourdieu mengungkapkan bahwa modal dan habitus akan dipertaruhkan dalam sebuah kerajaan yang merupakan arena kekuasaan, dimana sumber daya (modal) diperebutkan dan juga akses aman yang dekat dengan hierarki kekuasaan (Fashri, 2014). Dari ketiga komposisi tersebut, Bourdieu merumuskan: $\text{praktik} = (\text{habitus} \times \text{modal}) + \text{domain}$, praktik sosial merupakan hasil relasi habitus sebagai produk sejarah dan domain yang juga merupakan produk sejarah. Dalam ranah pemilikan modal, baik kekuatan maupun orang yang memiliki banyak modal, maupun orang yang tidak memiliki modal, dalam hal ini modal merupakan pemusatan kekuatan di mana kekuatan-kekuatan tertentu sedang bekerja dalam domain tersebut (Putra, 2017).

Seperti yang telah diuraikan, peneliti melihat adanya praktik yang dilakukan oleh kelompok migran sektor informal melihat kota Merauke sebagai semacam kawasan atau arena untuk melakukan suatu praktek akumulasi sebaliknya aktivitas ekonomi informal menjadi aktor atau pemain yang bermain di ranah ekonomi Kota Merauke. Dapat dikatakan bahwa ruang – ruang kota merupakan tempat pertarungan dan perjuangan para migran yang mengadakan persaingan untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Habitus dan modal para migran kelompok informal dipertaruhkan di sini. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada modal sosial dan budaya yang dimiliki para migran di sektor informal ketika mempertaruhkan perjuangannya untuk bersaing di ruang ekonomi. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa para migran di kota Merauke yang dapat dikatakan memiliki modal ekonomi yang tidak begitu kuat dibandingkan pemilik modal, tetap eksis dan dapat melakukan kegiatan jual beli dalam waktu yang relatif lama.

Wajar jika para migran disini memiliki modal selain modal ekonomi yang dapat mendorong untuk mengekspansi ruang informal ekonomi di Kota Merauke. Modal ekonomi bukan satu-satunya kekuatan untuk melanjutkan pertarungan di ruang ekonomi. Dapat disepakati bahwa jika modal ekonomi tidak diimbangi dengan modal sosial dan modal budaya yang berkualitas, ia akan mudah hancur. sekaligus juga menunjukkan bahwa migran di sektor informal dengan modal ekonomi seadanya bisa bertahan dan eksis hingga saat ini. Pada dasarnya migran di sektor informal ekonomi yang baik adalah praktik ekonomi yang meskipun kecil dan sederhana namun dapat bertahan lama dibandingkan dengan bisnis besar yang cepat tetapi tidak dapat bertahan lama. Sampai saat inipun migran di ruang informal ekonomi bertahan meski tergerus perkembangan jaman yang membutuhkan perubahan karena adanya modal sosial dan budaya yang kuat. Semua elemen ekonomi yang berada di bawah payung tradisi yang mereka bawa dari luar saling

membutuhkan sehingga terjadi simbiosis timbal balik antara pedagang, konsumen dan jasa pasar. Karena adanya modal sosial dan modal budaya para migran di sektor informal ekonomi, simbiosis mutualisme dapat terjalin di ruang informal ekonomi kota Merauke. Oleh karena itu, modal sosial dan modal budaya merupakan faktor penting dalam praktik ekonomi informal di kota kecil Merauke.

Kesimpulan

Terdapat dua faktor yang menjadi daya tarik migrasi yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) yang menjadi point penting bagi migran di sektor informal begitu besar di Kota Merauke. Hal dikarenakan keamanan yang stabil, keragaman peluang kerja maupun usaha, dan dinamika ekonomi politik yang terlihat stabil yang menjadi struktur peluang bagi kelas menengah di sektor informal mempertaruhkan modalitas untuk meraup keuntungan di sektor ekonomi informal. Dapat dikatakan bahwa konstelasi pada ruang ekonomi bagi para migran di sektor informal pada gilirannya menunjukkan pentingnya mereproduksi modal sosial dan budaya sebagai basis kekuatan yang akan mempertaruhkan dalam merebut ruang – ruang di sektor ekonomi informal di kota Merauke. Pada kenyataannya, akumulasi modal sosial dan modal budaya mereduksi seluruh eksistensi kelompok migran di sektor informal yang pada gilirannya menjadikan mereka bagian dari kelas – kelas sosial (kelas menengah) yang patut diperhitungkan yang mampu bertahan dalam arus dinamika sosial politik di Kota Merauke.

Referensi

- Banda, M. M. (2016). Teori Modal dalam Pewarisan Tradisi Lisan. In *Prosiding Seminar Nasional: Sastra, Budaya, dan Perubosial*. lppm@petra.ac.id
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2008). What is middle class about the middle classes around the world? *Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 3–28. <https://doi.org/10.1257/jep.22.2.3>
- Barro, R. (1996). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. In *NBER Working Paper 5698*.
- Barro, R. J. (1996). Determinants Of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. In *NBER Working Paper 5698* (Vol. 66, Issue August).
- Birdsall, N., C., G., & Pettinato, S. (2000). Stuck in Tunnel: Is Globalization Muddling the Middle? In *Brooking Working Paper 14*.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinctions: A Sosial Critique of the Judgment of Taste*. Harvard University Press.
- Bourdieu, P. (1993). Language and Symbolic Power. In *SubStance* (Vol. 22, Issue 2/3). Polity Press. <https://doi.org/10.2307/3685295>
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in education, society and culture*. SAGE Publications Inc.
- BPS. (2020). *BPS Papua*.

- BPS Indonesia. (2020). Angka Kemiskinan Tertinggi Ada di Papua dan Maluku. *Katadata.Co.Id*, September 2019, 2020.
- Darmaji, A. (2018). Kelas Menengah Santri Dan Proses Demokratisasi di Indonesia. *Refleksi*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/ref.v17i1.10195>
- Easterly, W. (2001). The Middle Class Consensus and Economic Development. *Journal of Economic Growth*, 4(6), 317 – 336. <https://doi.org/10.1023/A:1012786330095>
- Fashri, F. (2014). *Pierre Bourdieu Menyingkap kuasa simbol* (cet. 1, 20). JALASUTRA.
- Garrity, P., & Martin, C. (2018). Developing a microfinance model to break the cycle of poverty. *Business Horizons*, 61(6), 937–947. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.07.002>
- Hidayat. (1978). Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 26, 415–445.
- Horton, P. B., & Chester L. Hunt. (1992). *Sosiologi Jilid 2*. Erlangga.
- Jati, W. R. (2016a). *Peran Kelas Menengah Dalam Politik Indonesia : Sebuah Catatan Singkat*.
- Jati, W. R. (2016b). Rekonfigurasi Politik Kelas Menengah Indonesia. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 219–226. <https://doi.org/10.14203/JMI.V41I2.257>
- Jati, W. R. (2017a). Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial: Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 147. <https://doi.org/10.22146/jsp.24795>
- Jati, W. R. (2017b). Indonesia Understanding Indonesian Middle Class As Democracy. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(1), 17–29. <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i1.694>
- kontan.co.id. (2020). Bank Dunia: Ada 115 juta penduduk Indonesia berpotensi Jadi Kelas Menengah. *Nasional.Kontan.Co.Id*.
- Muin, I. (2004). *Sosiologi* (Erlangga (ed.)).
- Narwoko, J. D., & Suyatno, B. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Fajar Iterpratama Mandiri.
- Nazara, S. (2010). Informal Economy in Indonesia: Size, Composition, dan Evolution. In *International Labour Organization*. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_145402.pdf
- Ningrum, V., & Putri, Adhi Intan Perdana Ekaputri, A. D. (2014). Pola Pengeluaran Dan Gaya Hidup Penduduk Muda Kelas Menengah: Studi Empiris Perkotaan Di Jabodetabek. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 9(2), 95–106.
- Nizar, M. A. (2015). Middle Class and Its Implications for the Indonesian. *Munich Personal RePEc Archive*, 98471, 3. <https://mpr.a.ub.uni-muenchen.de/98471/>
- Pitirin A. Sorokin. (1998). *Social Stratification*. Harper & Row.
- Portes, A., & Haller, W. (2005). The Informal Economy. In *Handbook of Economic Sociology* (Issue December, pp. 403–425).
- Putra, A. P. (2017). Strategi Pedagang Pasar Malam. *Sosiatri-Sosiologi*, 5(2), 41–55.

- Rachbini, D. J. (1991). Dimensi Ekonomi dan Politik Pada Sektor Informal. *Prisma Majalah Kajian Ekonomi Dan Sosial*, 3–12.
- Ritzer, G., & Coleman, D. J. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media Group.
- Rosana Ellya. (2015). Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial. *Al - Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 10(1), 67–82.
- Sarmita, I. M., & Simamora, A. H. (2019). Karakteristik Sosial Ekonomi Dan Tipologi Migrasi Migran Asal Jawa Di Kuta Selatan-Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4(2), 135–143. <https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16528>
- Suara Merauke. (2022). *Per Juli 2022 , Realisasi PAD Kabupaten Merauke Sudah Mencapai 75 , 64 Persen*. 9–13.
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Hidayat, M., & Subiakto, H. (2019). Global vs. local: lifestyle and consumption behaviour among the urban middle class in East Java, Indonesia. *South East Asia Research*, 27(4), 398–417. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1703557>
- Syahril. (2014). Arena Cultural Production Symbolic and Violence (Analysis of Novel Banat al- Riyadh Pierre Bourdieu Sociology Perspective). *Jurnal Ilmiah Peuradeun, II*(Januari), 75–92.
- Tanter, R., & Young, K. (2018). Pendahuluan. In A. W. A. Ermando & E. N. I. Subono (Eds.), *Politik Kelas Menengah Indonesia* (pp. 1–18). LP3ES.
- Triwidodo, M., & Hidayat, A. (1991). *Sektor Informal : Permasalahan dan Harapan*. 75–82.
- van Klinken, G., & Berenschot, W. (2016). *In Search Of Middle Indonesia : Kelas Menengah Di Kota-Kota Menengah*.
- Wihardja, M. M., & Cunningham, W. (2021). Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia. In *Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia* (Issue June). <https://doi.org/10.1596/35848>